2021

RENJA

RENCANA KERJA DINPERMADES 2021

Pemerintah Kabupaten Rembang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Pemuda Km. 2, Sidowayah Kidul, Leteh,
Kec. Rembang, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah 59217

RENCANA KERJA
DINPERMADES KAB. REMBANG
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Awal (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMADES) Kabupaten Rembang Tahun 2021 setelah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 54Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah merupakan dokumen implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selain Undang-undang tersebut juga di dasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah.

Sesuai harapan kami Rencana Kerja Awal (RENJA) Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah serta demi terciptanya kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*CleanGovernment*). Selain itu sangatlah besar harapan kami untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang optimal terutama di urusanPelayanan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rembang yang lebih baik.

Rembang, Januari 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa
Kabupaten Rembang

H. SULISTIYINO, AP, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730528 199311 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINPERMADES KABUPATEN REMBANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINPERMADES Kabupaten Rembang tahun 2020,2019,2021 serta Capaian Renstra DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 5

2.2 Analisis Kinerja Layanan DINPERMADES Kabupaten Rembang 27

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINPERMADES Kabupaten Rembang 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINPERMADES KABUPATEN REMBANG 19

3.1. Telaah Renstra Kemendes (2015-2019) dan Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 65

3.2. Telaah Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 67

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades Kabupaten Rembang 68

3.4. Perbandingan Renstra lama dan Renstra Baru 70

3.5. Program dan Kegiatan 2021 73

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 76

BAB V. PENUTUP 106

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2020 6

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3Penyerapan Anggaran Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2018-2019 38

Tabel 2.4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Berdasarkan Indikator Sasaran Renstra th. 2016-2021 45

Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Rembang 48

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang 54

Tabel 3.1 Telaah Renstra Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 66

Tabel 3.2 Telaah Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 67

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan DINPERMADES Kabupaten 69

Rembang Tahun 2016-2021 .....
Tabel 3.4 Perbandingan Renstra Lama dan Renstra Baru DINPERMADES 70
Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan DINPERMADES 73
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 77

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Dalam rangka integrasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena di dalam Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu Renja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah pelaksanaan program tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa(Renja DINPERMADES) Tahun 2021 merupakan kewajiban bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini dilakukan selain untuk mengakomodir perubahan nomenklatur, juga untuk dapat menerapkan dan menyelaraskan berbagai aspek kebijakan kepala daerah yang tertuang di dalam penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

sebagaimana diinginkan oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati Rembang. Renja DINPERMADES disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat di DINPERMADES Kabupaten Rembang di dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik melalui pelayanan publik yang optimal. Selain itu dapat digunakan sebagai bentuk sarana evaluasi kinerja tahun sebelumnya sehingga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada DINPERMADES Kabupaten Rembang.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMADES) Kabupaten Rembang Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU tentang Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kembang nomor 2 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten rembang tahun 2016-2021
11. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun2016-2021.
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Rembang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja DINPERMADES dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2021. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah :

(1). menyediakan dokumen rencana teknis DINPERMADES Kabupaten Rembang dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

(2). menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja DINPERMADES Kabupaten Rembang atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur;

(3). menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

(4). penyesuaian Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2021 merupakan langkah adaptasi program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DINPERMADES Kabupaten Rembang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah :

(1). menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik secara terukur;

(2). menjamin konsistensi perencanaan teknis DINPERMADES Kabupaten Rembang dengan arahan strategis visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Rembang;

(3). memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja DINPERMADES Kabupaten Rembang maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun Lalu.

BAB III : Tujuan dan Sasaran DINPERMADES Kabupaten Rembang

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan DINPERMADES Kabupaten Rembang

BAB V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINPERMADES KABUPATEN REMBANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DINPERMADES Kabupaten Rembang

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifkasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2018 dan 2019. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2021. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi,sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pencapaian kinerja kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dicapai melalui program dan kegiatan yang uraiannya evaluasinya dapat dilihat pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DINPERMADES dan Pencapaian Renstra DINPERMADES s/d tahun 2019 Kabupaten Rembang.

Tabel 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020
DINPERMADES KABUPATEN REMBANG

KODE				Renstra Lama	Renstra Baru	Renstra Lama	Renstra Baru	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2018	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) th. 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) th.2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) th.2020	Realisasi Capaian Program da Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) th.2020	Tingkat Capaian realisaai Target Renstra (5)
1				2		3		4	5	6	7	8=(5+7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
			I	**Urusan Umum**											
			1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase pemenuhan pelayanan adm perkantoran**			100%	100%	100%	200%	-	-	
				1 Penyedia jasa surat menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat 900 surat , materai dan perangko selama 1 Tahun								-	

				2	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		Jumlah Jasa Listrik,Air ,Telpon dan Internet yang di bayarkan dalam 1 tahun			100%	100%	100%	200%	-	-	
				3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		jumlah Jasa servis laptop, AC, printer dan komputer dalam 1 tahun			100%	100%	100%	200%	-	-	
				4	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah Honor Penata Usahaan yang di bayarkan dalam 1 tahun		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				5	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah ATK yang disediakan dalam 1 tahun		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				6	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		jumlah biaya yang dibutuhkan untuk Cetak,Penggandaan dan Penjilidan dalam 1 tahun		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				9	Penyediaan peralatan rumah tangga		jumlah biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan peralatan rumah tangga dalam 1 tahun		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		jumlah biaya yang dibutuhkan untuk bahan bacaan dan perundang undangan dalam 1 tahun		-	100%	100%	100%	200%	-	-	

				11	Penyediaan makanan dan minuman		jumlah biaya yang dibutuhkan untuk minum staf,snek makan rapat dan tamu		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah		Jumlah Biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas Luar Daerah dalam 1 tahun		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				13	Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan		Jumlah Honor yang dibayarkan untuk THL dan Tenaga Kontrak dalam 1 tahun		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		jumlah biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas dalam Daerah selama 1 tahun		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
			2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik**		3 dok	100%	70%	75%	207%	100%	-	
				1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		jumlah biaya yang di butuhkan untuk pemeliharaan rutin berkala 5 kendaraan roda 4 kendaraan Dinas Operasional dalam 1 tahun		-	100%	100%	100%	200%	-	-	

				2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pengecatan dan perbaikan walpaper ruang kadin dinpermades		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
			3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			persentase kehadiran ASN Tepat Waktu			80%	-	-	-		**100%**	
				1	Pembinaan internal pegawai		Jumlah biaya untuk kebutuhan pembinaan pegawai Negeri Sipil, dan peningkatan ketrampilan pengetahuan aparatur dinpermades		-	100%	-	-	-	-	-	
							Persentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		100%	-	-	-	-	100%	-	
							jumlah biaya yang dibutuhkan untuk Senam Sehat di Lingkungan Dinpermades dalam 1 tahun		100%	-	-	-		100%	-	

							Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk Pengetahuan dan Ketrampilan Aparatur dalam Pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten lain dalam Provinsi		100%	-	-	-	-	100%	-	
			4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						100%	100%	100%	200%	-	-	
				1	Fasilitasi jasa olahraga		jumlah biaya yang dibutuhkan untuk Senam Sehat di Lingkungan Dinpermades dalam 1 tahun		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
						Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		% ketercukupan pelayanan umum	**95%**					**90%**		
								% ketercukupan sarana prasarana aparatur	**95%**					**90%**		
								% ketercapaian pelayanan kepegawaian	**95%**					**90%**		
								% ketercapaian pelayanan keuangan	**95%**					**90%**		

						Kegiatan Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum		% pemenuhan pelayanan adm. Perkantoran	100%					100%		
						Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		**Jumlah Dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik**	3 dok					3 dok		
						Peningkatan kualitas sumber daya aparatur		**Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik**	4 dok					4 dok		
						Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan		Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	**3 dok**					**3 dok**		
			5	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik			100%	100%	100%	-	-	
				1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja organisasi perangkat daerah		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja OPD		-	100%	100%	100%	200%	-	-	

				2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				3	Penyelenggaraan forum organisasi perangkat daerah		Jumlah biaya untuk kegiatan rapat forum OPD dg musulan kegiatan dari desa desa		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				4	Penyusunan renstra, renja		Tersusunnya dokumen Renstra Renja		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
							Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu		100%	-	-	-	-	100%	-	
							Tersusunnya DOKUMEN RKA, DPA dan laporan Keuangan		100%	-	-	-	-	100%	-	
						Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah	95%	-	-	-	-	90%	-	
						Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3dok	-	-	-	-	3dok	-	

					Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	2 dok	-	-	-	-	2 dok	-	
					Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik		Persentase Informasi yang disampaikan ke publik	95%	-	-	-	-	90%	-	
					Kegiatan Pengelolaan keterbukaan informasi publik		Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	2 info	-	-	-	-	2 info	-	
			6	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa**		% desa yang membentuk Bumdesa			75%	20%	41.00%	280%		-	
						% Bumdesa yang didampingi			100%	100%	100%	200%			
						% BKAD yang didampingi			100%	90%	100%	211.11%			
				1 Exit Strategi PNPM Perdesaan (Starategi Pasca PNPM Mandiri Perdesaan)		Sosialisasi Perda dan Perbup Pelestarian Aset Ex PNPM MPd, Pelatihan Pengelola Aplikasi Pelaporan, Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Honor THL (Pendamping Exit Strategi PNPM Mandiri Perdesaan)		-	100%	100%	100%	200%	-	-	

				2	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa)		Terlaksananya peingkatan Kapasitas pembina BUM Desa (Kabupaten/ Kecamatan)		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
			7	**Program Peningkatan Partisipasi Mayarakat dalam Pembangunan Desa**			% penduduk miskin yang dientaskan		-	13%	25%	51%	217%	-	-	
							% keaktifan Tim penanggulangan Kemiskinan Desa			0%	40%	0%	0%			
				1	Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG)		Pelatihan keterampilan pembuatan pakan ternak dan pengadaan alat ketrampilan, monitoring dan evaluasi		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				2	Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2MBG)		Jumlah peserta pelatihan ketrampilan industri rumahan		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				3	Pendampingan Rintisan Desa Model Desa Berdikari/Mandiri		Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi		-	100%	100%	100%	200%	-	-	

				4	Bazar TMMD		Pendampingan pengelola bazaar, Belanja Sembako		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
			8	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat**			% desa yang telah memenuhi standart pelayanan sosial dasar		-	12%	14%	100%	726%	-	-	
							% penyaluran modal UP2K usaha PKK			0%	40%	0%	0%			
							% Kader Pembangunan Masyarakat yang terlatih			100%	80%	100%	225%			
				-	Capacyty Building (Pengembangan Kemampuan/Pengelola Pembangunan Perdesaan)		Terlatihnya kader pemberdayaan masyarakat desa		-	0	287	287	100%	-	-	
				-	Penguatan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2k PKK) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluaraga (PKK)		Pembinaan UP2KPKK, Rakor, Pelatihan Pengelolaan Up2KPKK		-	100%	100%	100%	200%	-	-	

				- Penguatan Pokjanal Posyandu		Review Posyandu, Lomba Posyandu, Stratifikasi data Posyandu, Refresh bagi Pokja Tingkat Desa, Honor Tenaga Pendamping Program Posyandu		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
			9	**Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat**		Rata-rata persentase kesesuaian program RPJMDesa dengan Program Pemerintah Daerah		-	65%	80%	100%	190%	-	-	
						Rata-rata persentase focus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMDesa		-	13%	16%	100%	638%			
						% Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga adat yang diberdayakan		-	100%	100%	100%	200%			
						% Lembaga Kemasyarakatanya ng berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan		-	59%	72%	100%	198%			

				-	Operasional Pendamping Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan desa		Terlaksananya rapat koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam implementasi Undang-undang Desa		-	40%	60%	60%	140%	-	-	
				-	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Terlaksananya forum koordinasi kepala desa se Kab. Rembang		-	2	3	100%	233%	-	-	
				-	Penguatan Badan Perwakilan Desa		Terlaksananya peningkatan kapasitas BPD		-	100%	287	100%	100%	-	-	
				-	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan		Terlaksananya pelatihan bagi anggota TPK dari unsur masyarakat		-	100%	287	100%	100%	-	-	
				-	KIE Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakt Perdesaan		Rapat Koordinasi KIE Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Promosi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		-	100%	100%	100%	200%	-	-	

				-	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Alternatif		Rakor Forum TTG, Fasilitasi Pengembangan TTG Kecamatan, Fasilitasi Gelar TTG Nasional		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				-	Penguatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)		Rapat Koordinasi, Pengembangan Posyantek		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				-	Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kecamatan		Sosialisasi Pedoman Umum Posyantek, Pembentukan Posyantek Kecamatan, Monitoring dan Evaluasi		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				-	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan		Terlaksananya evaluasi/lomba desa/kelurahan		-	100%	287	100%	100%	-	-	
				-	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)		Kegiatan kesekretariatan, sekretaris, Pokja I, Pokja II, Pokja III, Pokja IV Tim Penggerak PKK		-	100%	100%	100%	200%	-	-	

				-	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)		Pergerakan Budaya Gotong Royong Membangun Desa		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				-	Gelar Hari Kesatuan Gerakan Pemberdayaan Keluarga		Lomba HKG Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Kabupaten		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				-	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan		Pelatihan Manajemen bagi pengelola Pasar desa, Validasi data pasar desa, Rapat Koordinasi, Honor THL Pendamping Lembaga Usaha Ekonomi Desa		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				-	Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS)		Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Rapat Evaluasi		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				-	Penguatan Kelembagaan Asosiasi Pengelola SPAMS Kabupaten		Rapat Koordinasi, Penguatan kapasitas Kelembagaan Asosiasi Pengelola SPAMS, Monitoring dan Evaluasi		-	100%	100%	100%	200%	-	-	

				-	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)		Fasilitasi Pengembangan Potensi Kawasan SIMOTURUN Kec. Bulu, Honor THL (Pendamping Pengembangan Kawasan Perdesaan		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
			10	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah**			% aparatur pemerintah yang mengikuti pelatihan		-	94%	100%	100%	194%	-	-	
				1	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipasi Desa		Terlaksananya Bintek Perencanaan Pembangunaan Partisipasif Desa dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa bagi Kades dan Perangkat Desa .		-	0	100%	100%	100%	-	-	
				2	Pengembangan Sistem Informasi Desa		Rakor Satgas dan Tim Teknis, Peningkatan Kapasitas Pengelola SID, Peningkatan Kapasitas Pengelola Satgas dan Tim Teknis SID		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				3	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		Terlaksananya pelatihan bagi sekdes, bendahara desa dan pelaksana kegiatan		-	287	287	287	28800%	-	-	

			11	**Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum**			Presentase sarpras paten dan pelayanan desa sesuai standart pelayanan		-	100%	31.81%	100%	414%	-	-	
				1	Pendampingan Pelaksanaan TMMD		Rapat Koordinasi TMMD, Monitoring dan Evaluasi, Honorarium PPKOM, Honorarium Pejabat Pengadaan, Honorarium PPHP, Honorarium Tim Perencana dan Pengawas		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				2	Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Kabupaten		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi lapangan dan administrasi kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten		-	100%	100%	95%	195%	-	-	
				3	Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Provinsi		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi lapangan dan administrasi kegiatan Bantuan Keuangan provinsi		-	100%	100%	95%	195%	-	-	

				4	Penyelenggaraan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)		Fasilitasi Penyelenggaraan TMMD		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
			12	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa**			% desa yang menyusun APBDesa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaskaan APBDes sesuai ketentuan		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
				1	Pengembangan SISKEUDES		Pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES		-	287	100%	100%	28800%	-	-	
				2	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa		Tertib laporan keuangan dan administrasi desa		-	287	0	0%	0%	-	-	
				3	Penataan Aset Desa		Tertib pencatatan dan pengelolaan aset desa		-	287	287	100%	28700%	-	-	
				4	Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil dan Retribusi Daerah		Tersalurnya dana transfer DD, ADD, DBH		-	287	287	100%	28700%	-	-	

				5	Fasilitasi Pengawalan, Pengawasan Dana Desa		Terlaksananya pembinaan pengawalan dana desa oleh TP4D, kepolisian		-	287	287	100%	28700%	-	-	
				6	Pendampingan Penyusunan Profil Desa		Pendampingan penyusunan profil desa		-	287	0	0	0%	-	-	
			13	**Program Peningkatan Peran Serta Perempppuan di Perdesaan**			Presentase Pasangan Usaha Subur (PUS) yang Menjadi Anggota UPPKS		-	0%	88.90%	0%	0%	-	-	
				1	Pemberdayaan perempuan perdesaan		Presentase Pasangan Usaha Subur (PUS) yang Menjadi Anggota UPPKS		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
			14	**Program Penanggulangan Kemiskinan**			Presentase Pelaksanaan Regulasi TKPKD		-	0%	75%	0%	0%	-	-	
				1	Pelatihan Usaha Mandiri		Presentase Pelaksanaan Regulasi TKPKD		-	100%	100%	100%	200%	-	-	
						Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan		% kawasan perdesaan yang terbentuk	16%	-	-	-	-	9.75%	-	

								% Desa yang telah melakukan kerjasama	85%					75%		
						Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis masyarakat		Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	1 Kawasan	-	-	-	-	2 Kawasan	-	
								Jumlah desa yang melakukan kerjasama	47 Desa	-	-	-	-	47 Desa	-	
						Kegiatan Pengembangan Kerjasama, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG)		Jumlah TTG yang dimanfaatkan Industri Rumahan Keluarga Miskin	3 TTG	-	-	-	-	3 TTG	-	
						Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa		% Desa yang mengalokasikan anggaran untuk Program Penaggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS	80%	-	-	-	-	70%	-	

								% Pemerintah Desa yang Memberikan Pelayanan Publik	100%	-	-	-	-	100%	-	
								% desa dengan pengelolaan APBdesa secara akuntabel	95%	-	-	-	-	90%	-	
						Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Aset Desa		Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (Pronsngkis	Rp. 19.803.000.000	-	-	-	-	Rp. 19.803.000.000	-	
						Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa		Jumlah Pemerintah Desa yang memberikan spelayanan publik esuai standart	287 Desa	-	-	-	-	287 Desa	-	
						Program Penguatan Kelembagaan desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat		% Lembaga Desa Aktif kat	90%	-	-	-	-	85%	-	

						Kegiatan Penguatan Lembaga Ekonomi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Bumdesa yang Bermitra dengan industry Rumahan	11 Bumdesa	-	-	-	-	11 Bumdesa	-	
								% Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	85%	-	-	-	-	85%		
						Kegiatan Penguatan Lembaga Sosial Budaya		jumlah Lembaga Sosial Budya Desa yang Aktif	56 Lembaga	-	-	-	-	56 Lembaga	-	
								% Lembaga social budaya desa aktif	90%					85%		

Dari tabel 2.1 diatas maka pokok-pokok evaluasi yang diuraikan adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi / yang memenuhi/ didukung oleh target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada urusan pemberdayaan Masyarakat adalah Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah merupakan program pendukung pelyanan Masyarakat dibidang Pemberdayaan masyarakat, dimana Realisasi program/kegiatan tersebut sangat menentukan indikatorn capaian tersebut bisa tercapai sesuai target atau telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; adalah adanya capaian kinerja melebihi target kinerja pada tahun 2020 akan di muncul dari salah satu capaian kinerja yang telah ada.
c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan akan dimunculkan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya, untuk lebih baik dan bisa memenuhi kekurangan kendala / penyebab tidak tercapainya terget kinerja yang sudah di tetapkan, Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; adalah dengan menambahkan pos anggaran untuk penyediaan sarana prasarana serta operasional pelayanan publik urusan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DINPERMADESKabupaten Rembang

Pencapaian hasil kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Rembang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kinerja yang dilihat dari pencapaian target realisasi indikator kinerja program, dan kinerja yang dilihat dari pencapaian target dan realisasi indikator makro yang dimuat di dalam RPJMD tahun 2016-202 dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Rembang mengampu urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yakni urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 sebagaimana tersaji pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINPERMADES Kab. Rembang

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program		Indikator		SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
	RENSTRA LAMA	RENSTRA BARU	RENSTRA LAMA	RENSTRA BARU			TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2		3		4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat		Urusan Pemberdayaan Masyarakat											
	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat		Rata-Rata Persentase kesesuaian Program RPJMDesa dengan program Pemerintah daerah			Terlaksananya rapat koordinasi, evaluasi dan pelaporan dalam implementasi undang-undang desa	65%	80%	-	99,50%	100%	-	-	
			Rata-Rata persentase fokus program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMdes			Terlaksananya forum koordinasi kepala desa se kab. Rembang	13%	16%	-	100%	100%	-	-	
			Presentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat yang telah diberdayakan			Terlaksananya peningkatan kapasitas BPD	100%	100%	-	99,74%	100%	-	-	

			Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan			Terlaksananya pelatihan bagi anggota TPK dari unsur masyarakat	59%	72%	-	100%	100%	-	-	
						Rapat koordinasi KIE pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, promosi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa								
						Pembinaan lembaga sosial budaya perdesaan, rapat koordinasi								
						Rakor forum TTG, fasilitasi pengembangan TTG kecamatan, fasilitasi gelar TTG nasional								
						Rapat koordinasi, pengembangan posyantek								
						Sosialisasi pedoman umum posyantek, pembentukan posyantek kecamatan, monitoring dan evaluasi								

						Terlaksananya evaluasi/lomba desa/kelurahan							
						Kegiatan kesekretariatan , sekretaris, pokja I, pokja II, pokja III, pokja IV tim penggerak PKK							
						Pergerakan budaya gotong royong membangun desa							
						Lomba HKG pencanangan hari kesatuan gerak PKK tingkat kabupaten							
						Pelatihan manajeman bagi pengelola pasar desa, validasi data pasar desa, rapat koordinasi, honor THL pendamping lembaga usaha							
						Rapat koordinasi , monitoring dan evaluasi, rapat evaluasi							

						Rapat koordinasi, penguatan kapasitas kelembagaan asosiasi pengelola SPAMS, monitoring dan evaluasi							
						Fasilitasi pengembangan potensi kawasan SIMOTURUN Kec. Bulu, honor THL (pendamping pengembagan kawasan perdesaan							
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah		Presentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan			Terlaksananya bintek perencanaan pembangunan partipasif desa dalam penyusunan RPJM desa dan RKP desa bagi kades dan perangkat desa	94%	100%	-	99,74%	100%	-	-
						Rakor satgas dan tim teknis, peningkatan kapasitas pengelola SID, peningkatan kapasitas pengelola satgas dan tim SID							

						Terlaksananya pelatihan bagi sekdes, bendahara desa dan pelaksana kegiatan							
	Program peningkatan sarana prasarana pemerintah dan pelayanan umum		Persentase sarpras paten dan pelayanan desa sesuai standar pelayanan			Rapat koordinasi TMMD, monitoring dan evaluasi, honorium pejabat pengadaan, honorium PPHP, honorium tim perencana dan pengawas	100%	31,81%	-	100%	100%	-	-	
						Terlaksananya monitoring, evaluasi dan verifikasi lapangan dan administrasi kegiatan bantuan keuangan kabupaten								

						Terlaksananya monitoring, evaluasi dan verifikasi lapangan dan administrasi kegiatan bantuan keuangan provinsi								
						Fasilitasi penyelenggaraan TTMD								
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa		Presentase desa yang menyusun APBDes dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan			Pengelolaan keuangan keuangan desa berbasis SISKEUDES	100%	100%	-	100%	100%	-	-	
						Tertib laporan keuangan dan admisistrasi desa								

						Tertib pencatatan dan pengelolaan aset desa								
						Tersalurnya dana tranver DD, ADD, DBH								
						Terlaksananya pembinaan pengawalan dana desa oleh TP4D, kepolisian								
						Pendampingan penyusunan profil desa								
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat		Presentase desa yang telah memenuhi standar pelayanan sosial dasar				12%	14%	-	99,93%	100%	-	-	

			Presentase penyaluran modal usaha UP2K-PKK				0%	40%	-	0%	0%	-	-	
			Presentase kader pembangunan masyarakat yang terlatih				100%	80%	-	100%	100%	-	-	
	Program pengembangan lembaga ekonomi desa		Persentase desa yang membentuk BUMDes				75%	20%	-	98%	41%	-	-	
			Persentase desa BUMDes yang di dampingi				100%	100%	-	100%	100%	-	-	
			Persentase BKAD yang didampingi				100%	90%	-	100%	100%	-	-	

	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa		Persentase penduduk miskin yang dientaskan				13%	25%	-	20%	51%	-	-	
			Presentasi keaktifan tim penanggulangan kemiskinan desa				0%	40%	-	0%	0%	-	-	
			Posyandu aktif				1225	1225	-	1233	1232	-	-	
			Presentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				1,1	1,4	-	1,3	1,4	-	-	

		Program Kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan		% Kawasan perdesaan yang terbentuk			-	-	9,75%	-	-	9,75%	16%	
				% Desa yang telah melakukan kerjasama			-	-	75%	-	-	75%	85%	
		Program Penyelenggaraan pemberdayaan pemerintah desa		% Desa yang melaksanakan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan (PRONANGKIS)			-	-	70%	-	-	70%	80%	
				% Pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik			-	-	100%	-	-	100%	100%	
				% Desa dengan pengelolaan APBDes secara akuntabel			-	-	90%	-	-	90%	95%	
		Program Penguatan kelembagaan desa berbasis pemberdayaan masyarakat		% Lembaga desa aktif			-	-	85%	-	-	85%	90%	

Tabel 2.3.
Penyerapan Anggaran Dinpermades Kabupaten Rembang
Tahun 2018 – 2019

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	BELANJA	7.758.775.000,00	8.861.585.809,00	7.642.861.453,00	98,51	8.732.488.406,00	98.54
A.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.273.800.000,00	3.455.779.809,00	3.187.699.335,00	97,37	3.408.637.196,00	98,64
	Belanja Pegawai	3.273.800.000,00	3.455.779.809,00	3.187.699.335,00	97,37	3.408.637.196,00	98,64
1	Gaji dan Tunjangan	2.298.200.000,00	2.482.779.809,00	2.256.949.335,00	98,21	2.450.603.196,00	98,70
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.748.248.597,00	1.909.919.494,00	1.717.310.000,00	98,23	1.892.158.200,00	99,07
	Tunjangan Keluarga	172.885.661,00	183.139.515,00	169.944.236,00	98,30	181.447.812,00	99,08
	Tunjangan Jabatan	153.497.885,00	146.338.900,00	150.570.000,00	98,09	136.130.000,00	93,02
	Tunjangan Fungsional Umum	63.458.300,00	67.771.000,00	62.170.000,00	97,97	67.100.000,00	99,01
	Tunjangan Beras	98.817.814,00	100.500.131,00	96.825.540,00	97,98	99.505.080,00	99,01
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.221.126,00	5.242.477,00	3.212.772,00	99,74	5.242.477,00	100,00
	Pembulatan Gaji	29.581,00	27.124,00	27.510,00	93,00	26.915,00	99,23
	Iuran Asuransi Kesehatan	49.872.154,00	53.976.327,00	48.883.370,00	98,02	53.480.017,00	99,08
	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	3.630.733,00	3.938.981,00	3.558.165,00	98,00	3.879.950,00	98,50
	Iuran Asuransi Kematian	4.538.149,00	11.925.860,00	4.447.742,00	98,01	11.632.745,00	97,54
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	975.600.000,00	973.000.000,00	930.750.000,00	95,40	958.034.000,00	98,46
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	975.600.000,00	973.000.000,00	930.750.000,00	95,40	958.034.000,00	98,46
B	**BELANJA LANGSUNG**	4.484.975.000,00	5.405.806.000,00	4.455.162.118,00	99,34	5.323.851.210,00	98,48
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	502.485.000,00	486.806.000,00	497.479.961,00	99,00	468,131,914.00	96,16
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	1.000.000,00	3.975.000,00	99,38	997,500.00	99.75
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	49.000.000,00	31.621.122,00	87,84	38,868,300.00	79.32
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	100,00	8,500,000.00	100,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156.000.000,00	156.000.000,00	155.999.875,00	100,00	154,999,600.00	99.36
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.000.000,00	15.000.000,00	31.000.000,00	100,00	15,000,000.00	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	100,00	14,995,830.00	99.97

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.000.000,00	7.500.000,00	22.000.000,00	100,00	7,499,250.00	99.99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		2.129.500,00			1.650.000	77,48
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	5,000,000.00	18.000.000,00	100,00	4,999,800.00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	3,000,000.00	3.430.000,00	85,75	2,970,000.00	99.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	36.000.000,00	25,000,000.00	35.975.000,00	99,93	24,999,300.00	100,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	90.000.000,00	133,306,000.00	89.994.514,00	99,99	130,132,634.00	97.62
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	65.485.000,00	51,370,500.00	65.485.000,00	100,00	47,579,700.00	92.62
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	13.000.000,00	15,000,000.00	13.000.000,00	100,00	14,940,000.00	99.60
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000,00	90,000,000.00	98.224.300,00	98,22	85,980,200.00	95.53
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.000.000,00		14.900.000,00	99,33		
	Pengadaan peralatan kantor	20.000.000,00		19.975.800,00	99,88		
	Pengadaan alat-alat komunikasi	9.000.000,00		9.000.000,00	100,00		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000,00	50,000,000.00	24.997.000,00	99,99	50,000,000.00	100,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	31.000.000,00	40,000,000.00	29.351.500,00	94,68	35,980,200.00	89.95
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100,000,000.00			99,700,000.00	99.70
	Pembinaan Internal Pegawai		100,000,000.00			99,700,000.00	99.70
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.000.000,00	10,000,000.00	15.490.000,00	96,81	10,000,000.00	100,00
	Fasilitasi Jasa Olahraga	12.000.000,00	10,000,000.00	11.990.000,00	99,92	10,000,000.00	100,00
	Bimbingan Mental Rohani	4.000.000,00		3.500.000,00	87,50		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000,00	39,000,000.00	58.984.300,00	98,31	38,778,490.00	99.43

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	8.000.000,00	10,000,000.00	8.000.000,00	100,00	9,959,900.00	99.60
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	12.200.000,00	10,000,000.00	12.200.000,00	100,00	9,979,700.00	99.80
	Penyelenggaraan forum Organisasi Perangkat Daerah	13.000.000,00	9,000,000.00	13.000.000,00	100,00	8,888,890.00	98.77
	Penyusunan Renstra, Renja	8.200.000,00	10,000,000.00	7.826.300,00	95,44	9,950,000.00	99.50
	Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	18.600.000,00		17.958.000,00	96,55		
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	156.200.000,00	160,000,000.00	155.618.829,00	99,63	158,036,650.00	98.77
	Exit Strategi PNPM Mandiri Perdesaan (Strategi Pasca PNPM Mandiri Perdesaan)	49.500.000,00	60,000,000.00	49.019.329,00	99,03	59,948,000.00	99.91
	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	106.700.000,00	100,000,000.00	106.599.500,00	99,91	98,088,650.00	98.09
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	239.850.000,00	158,000,000.00	239.524.300,00	99,86	156,559,970.00	99.09
	Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG)	125.000.000,00	60,000,000.00	124.999.500,00	100,00	59,923,170.00	99.87
	Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)	50.000.000,00	50,000,000.00	49.899.800,00	99,80	48,648,750.00	97.30
	Pendampingan Rintisan Model Desa Berdikari/Mandiri	18.000.000,00	18,000,000.00	17.950.000,00	99,72	17,988,050.00	99.93
	Penyelenggaraan Bazar TMMD	46.850.000,00	30,000,000.00	46.675.000,00	99,63	30,000,000.00	100,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	276.750.000,00	123,000,000.00	270.326.100,00	97,68	121,580,500.00	98.85
	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Desa bagi perangkat desa baru	58.000.000,00		56.515.000,00	97,44		

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Capacity Building (Pengembangan Kemampuan/Pengelola Pembangunan Perdesaan)	38.000.000,00	26,000,000.00	37.468.000,00	98,60	25,670,500.00	98.73
	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	45.000.000,00		42.293.250,00	93,99		
	Penguatan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	17.950.000,00	30,000,000.00	17.949.850,00	100,00	29,975,600.00	99.92
	Penguatan Pokjanal Posyandu	72.800.000,00	67,000,000.00	72.750.000,00	99,93	65,934,400.00	98.41
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perdesaan	45.000.000,00		43.350.000,00	96,33		
	Program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.503.400.000,00		1.503.261.000,00	99,99		
	Penyelenggaraan Tentara Manunggal Membangun Desa(TMMD)	1.503.400.000,00		1.503.261.000,00	99,99		
	Program Pengelolaan Lingkungan Sosial	94.000.000,00		91.089.500,00	96,90		
	Monitoring, Verifikasi, Supervisi dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Kabupaten	50.000.000,00		48.825.000,00	97,65		
	Monitoring, Verifikasi, Supervisi dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi	44.000.000,00		42.264.500,00	96,06		
	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa	67.000.000,00		66.956.594,00	99,94		
	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)	67.000.000,00		66.956.594,00	99,94		
	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	939.600.000,00	1,679,000,000.00	938.167.225,00	99,85	1,664,269,268.00	99.12
	Operasional Pendamping Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat dan Desa	65.000.000,00	67,500,000.00	64.969.000,00	99,95	65,561,400.00	97.13
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		20,000,000.00			19,999,950.00	100,00

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Penguatan Badan Perwakilan Desa (BPD)		21,000,000.00			20,775,500.00	98.93
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perdesaan		16,000,000.00			13,592,500.00	84.95
	KIE Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	26.150.000,00	50,000,000.00	26.149.900,00	100,00	47,833,950.00	95.67
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Sosial Budaya Perdesaan	10.550.000,00	20,000,000.00	10.550.000,00	100,00	19,953,200.00	99.77
	Pengembangan Teknologi Tepat Guna(TTG) Alternatif	188.300.000,00	100,000,000.00	187.780.500,00	99,72	99,837,224.00	99.84
	Penguatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	10.000.000,00	17,000,000.00	10.000.000,00	100,00	16,747,750.00	98.52
	Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kecamatan	13.500.000,00	17,000,000.00	13.499.925,00	100,00	16,916,950.00	99.51
	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan		39,500,000.00			38,816,000.00	98.27
	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	450.000.000,00	550,000,000.00	449.620.400,00	99,92	548,935,270.00	99.81
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	39.160.000,00	50,000,000.00	39.160.000,00	100,00	49,649,800.00	99.30
	Gelar Hari Kesatuan Gerakan Pemberdayaan Keluarga	45.000.000,00	100,000,000.00	45.000.000,00	100,00	99,890,000.00	99.89
	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan	44.840.000,00	44,000,000.00	44.837.500,00	99,99	43,975,050.00	99.94
	Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP SPAM)	25.100.000,00	30,000,000.00	24.600.000,00	98,01	29,524,750.00	98.42
	Penguatan Kelembagaan Asosiasi Pengelola SPAMS Kabupaten	22.000.000,00	70,000,000.00	22.000.000,00	100,00	69,960,000.00	99.94
	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)		467,000,000.00			462,299,974.00	98.99
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	123.790.000,00	188,000,000.00	123.094.925,00	99,44	170,714,999.00	90.81
	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipasif Desa		50,000,000.00			38,945,849.00	77.89
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	123.790.000,00	107,000,000.00	123.094.925,00	99,44	104,109,150.00	97.30
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		31,000,000.00			27,660,000.00	89.23

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	37.900.000,00	1,642,300,000.00	37.850.000,00	99,87	1,635,960,480.00	99.61
	Pendampingan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II dan III	37.900.000,00	40,000,000.00	37.850.000,00	99,87	39,478,080.00	98.70
	Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Kabupaten		175,000,000.00			172,595,000.00	98.63
	Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Provinsi		82,300,000.00			78,887,400.00	95.85
	Penyelenggaraan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD**)**		1,345,000,000.00			1,345,000,000.00	100,00
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa	368.000.000,00	709,700,000.00	359.095.084,00	97,58	694,259,039.00	97.82
	Pengembangan SISKEUDES		148,500,000.00			143,455,900.00	96.60
	Penataan Aset Desa		50,000,000.00			43,980,200.00	87.96
	Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil dan Retribusi Daerah		491,200,000.00			487,145,439.00	99.17
	Fasilitasi Pengawalan, Pengawasan Dana Desa		20,000,000.00			19,677,500.00	98.39
	Pendampingan Penyusunan Profil Desa		-			-	-
	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa	45.000.000,00		43.511.500,00	96,69		
	Pelatihan SISKEUDES	67.000.000,00		66.310.000,00	98,97		
	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	27.000.000,00	-	25.721.000,00	95,26	-	-
	Forum Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.000.000,00		17.400.000,00	96,67		
	Pembinaan dan Penguatan Badan Perwakilan Desa (BPD)	2.000.000,00		1.687.000,00	84,35		
	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil dan Retribusi Daerah	209.000.000,00		204.465.584,00	97,83		
	Program peningkatan peran serta perempuan di		10,000,000.00			9.927.700,00	99.28

No	URAIAN BELANJA	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN			
				TH. 2018		TH. 2019	
		TH. 2018	TH. 2019	Rp.	%	Rp.	%
	perdesaan						
	Pemberdayan Perempuan Perdesaan		10,000,000.00			9,927,700.00	99.28
	Program Penanggulangan kemiskinan		10,000,000.00			9,952,000.00	99.52
	Pelatihan usaha mandiri		10.000.000,00			9,952,000.00	99.52

Dilihat dari tabel 2.3. diatas pada tahun 2018 terdapat 14 program sedangkan tahun 2019 terdapat 14 program yang terdanai.Dari segi anggaran pada tahun 2018 senilai Rp 7.758.775.000- dan pada tahun 2019 senilai Rp. 8.861.585.809 bertambah Rp. 1.102.810.809 (0,15%).

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

Pada tahun anggaran 2018, Dinpemades Kabupaten Rembang memiliki total anggaran sebesar Rp. 7.758.775.000,00 Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.273.800.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 4.484.975.000,00 Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri dari 14 program / 61 kegiatan. Anggaran yang terserap dari total anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.732.488.406,00 atau sekitar 98,54%.

Sedangkan pada tahun anggaran 2019, Dinpermades Kabupaten Rembang memiliki total anggaran sebesar Rp. 8.861.585.809,00 Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.455.779.809,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 5,405,806,000.00Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri dari 14 program / 63 kegiatan. Anggaran yang terserap dari total anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.732.488.406,00 atau sekitar 98,54 %.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinpermdes Kab. Rembang
Berdasarkan Indikator Sasaran Renstra th. 2016-2021

Tabel Capaaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

Sasaran : Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian 2019	% apaian 2018	% Capaian 2017	RPJMD	
	2019	2019				Target AKhir 2021	% capaian s/d 2019
1	2	3	4=3/2*100%	5	6	7	8=3/7*100%
Posyandu Aktif	1.225	1.232	100,5 %	101 %	100,2 %	1.225	100,5 %
Prosentase swadaya masyarakat terhadapt program pemberdayaan masyarakat	1,4	1,4	100 %	100 %	100 %	1,1	78 %

Sumber : LKJIP Dinpermades Kab. Rembang th. 2019.

Berdasarkan tabel diatas capain sasaran strategis meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidupperempuan dan pemenuhan hak anak. Telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai 100% dan 105 % demikian juga capaian , demikian juga akhir renstra pada tahun 2019 mencapai 100,5% dan 78%, tentang permendagri 86 tahun 2014-2019 tentang indikator sasaran dinpermadesa mengidentisifiksikan bahwa sasaran dinpermades mendapatkan nilai 1,4.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran sesuai dengan Penetapak Indikator Kinerja Utama Dinpermades tahun 2019 dapat tercapai 100% atau kategori **"memuaskan".**

Sumber : LKJIP Dinpermades Kab. Rembang th. 2019.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINPERMADES Kabupaten Rembang

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan DINPERMADES Kabupaten Rembang pada Tahun 2016-2021, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DINPERMADES Kabupaten Rembang. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi DINPERMADES Kabupaten Rembang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

(1). Rendahnya tingkat kemandirian Desa di Kabupaten Rembang

(2). Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa

(3). Belum optimalnya penguatan Lemaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat

(4). Belum optimalnya kinerja desa dalam pengembangan kawasan

(5). Belum semua desa menyusun regulasi pengembangan kawasan perdesaan

Berangkat dari telaahan kondisi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang baik dari tantangan dan peluang, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran2021. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rancangan awal diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Rembang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
A	**Urusan UMUM (KESEKRETARIATAN)**					**4.735.723.000**	**Urusan Umum (Kesekretariatan)**					**4.735.723.000**	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian pelayanan umum, Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur, Persentase pemenuhan pelayanan Kepegawaian Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan, Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik	%	95 95 95 95 70 95	Kab.Rembang	**4.735.723.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase ketercapaian pelayanan umum, Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur, Persentase pemenuhan pelayanan Kepegawaian Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan, Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik	%	95 95 95 95 70 95	**Kab.Rembang**	**4.735.723.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun,Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik	dok / informasi	3/3/2		**56.100.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah**	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun,Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik	dok /informasi	3/3/2		**56.100.000**	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	2		**16.000.000**	**Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	2		**16.000.000**	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	1		**4.700.000**	**Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD**	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	1		**4.7000.000**	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik	Dok /informasi	2 / 2		**35.400.000**	**Evaluasi kinerja perangkat daerah**	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik	Dok /informasi	2 / 2		**35.400.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik	dok	3		**3.549.883.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik	dok	3		**3.549.883.000**	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik	dok	1		**3.324.283.000**	**Penyediaan gaji dan tunjangan ASN**	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik	dok	1		**3.324.283.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik	dok	2		**225.600.000**	**Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD**	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik	dok	2		**225.600.000**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik	dok	4		**10.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik	dok	4		**10.000.000**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik dalam pelayanan kepegawaian	dok	4		**10.000.000**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai**	Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik dalam pelayanan kepegawaian	dok	4		**10.000.000**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		**235.100.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		**235.100.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja	%	100		**7.500.000**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja	%	100		**7.500.000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan sarana kerja aparatur	%	100		**14.000.000**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan sarana kerja aparatur	%	100		**14.000.000**	
	Penyediaan	% pemenuhan	%	100		**10.000.000**	**Penyediaan**	% pemenuhan	%	100		**10.000.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	peralatan rumah tangga	pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor					**peralatan rumah tangga**	pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor					
	Peyediaan bahan logistik kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor				**30.000.000**	**Peyediaan bahan logistik kantor**	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor				**30.000.000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		**10.000.000**	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		**10.000.000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		**3.600.000**	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		**3.600.000**	
	Penyediaan bahan/material	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		**20.000.000**	**Penyediaan bahan/material**	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		**20.000.000**	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan Perjalanan Dinas aparatur	%	100		**140.000.000**	**Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan Perjalanan Dinas aparatur	%	100		**140.000.000**	
	Penyediaan	Persentase	%	100		**619.640.000**	**Penyediaan**	Persentase	%	100		**619.640.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran					**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		**3.000.000**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		**3.000.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		**54.596.000**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		**54.596.000**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		**10.000.000**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		**10.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		**552.044.000**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100		**552.044.000**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik	dok	2		**265.000.000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik	dok	2		**265.000.000**	
	Penyediaan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang	dok	1		**40.000.000**	Penyediaan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang	dok	1		**40.000.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Milik daerah yang Dikelola dengan baik					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Milik daerah yang Dikelola dengan baik					
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik	dok	1		**225.000.000**	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik	dok	1		**225.000.000**	
	Program Penataan Desa	Persentase pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik	%	100%		**151.654.276.000**	**Program Penataan Desa**	Persentase pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik	%	100%		**27.810.000.000**	
	Penyelenggaraan penataan desa	Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	desa	258		**153.634.276.000**	**Penyelenggaraan penataan desa**	Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	desa	258		**27.810.000.000**	
	Fasilitasi penataan kewenangan desa	Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	desa	30		**50.000.000**	**Fasilitasi penataan kewenangan desa**	Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	desa	30		**50.000.000**	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana					**27.815.000.000**	**Fasilitasi Sarana dan Prasarana**					**27.760.000.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	desa						**Desa**						
	Penyediaan Dana Operasional, Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa					**125.769.276.000**	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	Persentase Kawasan Perdesaan yang berkembang (Jumlah kawasan berkembang : Jumlah kawasan yg terbentukk X 100%, Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	%	16 85		**1.577.700.000**	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kawasan Perdesaan yang berkembang (Jumlah kawasan berkembang : Jumlah kawasan yg terbentukk X 100%, Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	%	16 85		**1.577.700.000**	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	kawasan	2		**1.577.700.000**	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	kawasan	2		**1.577.700.000**	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten /Kota**	Jumlah MOU/ perjanjian kerjasama yang difasilitasi	MOU	4		**105.000.000**	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten /Kota	Jumlah MOU/ perjanjian kerjasama yang difasilitasi	MOU	4		**105.000.000**	**Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten / kota**	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa/kecamatan /kabupaten	desa	4		**895.000.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fassilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten / kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa/kecamatan /kabupaten	desa	4		**895.000.000**	**Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan**	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	kawasan	2		**577.700.000**	
	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	kws	2		**577.700.000**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS), Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik, Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	%	80 100 95		**124.798.971.000**	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS), Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik, Persentase desa	%	80 100 95		**1.029.695.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis)	Rp.	19229000000000		**124.798.971.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel											
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis)	Rp.	1922900 0000000		**1.029.695.000**	**Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi antara Dinas, Kecamatan, TPP dan instansi lintas sektoral	Keg	20		**40.000.000**	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi antara Dinas, Kecamatan, TPP dan instansi lintas sektoral	Keg	20		**140.000.000**	**Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa**	Jumlah peserta pelatihan penyusunan produk hukum desa	org	80		**20.000.000**	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah peserta pelatihan penyusunan produk hukum desa	org	80		**20.000.000**	**Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa**	Jumlah peserta pelatihan perencanaan pembangunan partifisipatif	org	80		**30.000.000**	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta pelatihan perencanaan pembangunan partifisipatif	org	80		**30.000.000**	**Fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	Jumlah peserta pelatihan dan monitoring pengelolaan keuangan desa	org	287		**123.968.971.000**	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta pelatihan dan monitoring pengelolaan keuangan desa	org	287		**74.695.000**	**Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD**	Jumlah peserta yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek	org	60		**25.000.000**	
	Pembinaan Peningkatan	Jumlah peserta yang dikirim mengikuti	org	60		**50.000.000**	**Evaluasi dan pengawasan**	Jumlah anggaran evaluasi dan	Peratura	574		**525.000.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kapasitas Anggota BPD	pelatihan/ bimtek					**peraturan desa**	pengawasan peraturan desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis)	n desa				
	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah anggaran evaluasi dan pengawasan peraturan desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis)	Peraturan desa	574		**525.000.000**	**Penyelenggaraan pemilihan, pengangakatan, pemberhentian kepala desa**	Jumlah pelaksanaan pilkades	kegiatan	10		**50.000.000**	
	Penyelenggaraan pemilihan, pengangakatan, pemberhentian kepala desa	Jumlah pelaksanaan pilkades	kegiatan	10		**50.000.000**	**Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa**	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengisian perangkat desa	kegiatan	60		**50.000.000**	
	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengisian perangkat desa	kegiatan	60		**50.000.000**	**Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Pengembangan Website Desa**	Terlaksananya kegiatan evaluasi perkembangan desa	keg	1		**90.000.000**	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Pengembangan Website Desa	Terlaksananya kegiatan evaluasi perkembangan desa	keg	1		**90.000.000**	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat**	Persentase Lembaga Desa aktif	%	90		1.062.400.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Hukum Adat						
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Desa aktif	%	90		**1.062.400.000**	**Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah /Kabupaten/ Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang bina, Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumahan, Jumlah lembaga sosial budaya desa yang dibina, Jumlah TTG yang dimanfaatkan Industri Rumahan Keluarga Miskin	Lembaga, buah	138,24, 5650, 1		1.062.400.000	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah /Kabupaten/	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang bina, Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumahan, Jumlah lembaga sosial budaya desa yang dibina, Jumlah TTG yang dimanfaatkan	Lembaga, buah	138,24, 5650, 1		**1.062.400.000**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan**	Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif	lembaga	5358		133.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/ Kota	Industri Rumahan Keluarga Miskin					**Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**						
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif	lembaga	5358		133.000.000	**Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**	Jumlah lembaga ekonomi desa yang aktif, jumlah bumdesa yang bermitra denga industri rumahan	lembaga	138, 24		105.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah lembaga ekonomi desa yang aktif, jumlah bumdesa yang bermitra denga	lembaga	138, 24		105.000.000	**Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi**	Jumlah alat TTG yang dimanfaatkan Industri Rumah tangga	buah	1		124.400.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	industri rumahan					**Tepat Guna**						
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah alat TTG yang dimanfaatkan Industri Rumah tangga	buah	1		124.400.000	**Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat**	Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif dalam mendukung bulan bhakti gotong royong masyarakat	lembaga	5		50.000.000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif dalam mendukung bulan bhakti gotong royong masyarakat	lembaga	5		50.000.000	**Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif	lembaga	287		650.000.000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif	lembaga	287		650.000.000							
TOTAL PAGU INDIKATIF						**160.059.794.000**						**159.984.794.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD 2021						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	SAT	Target Capaian	Lokasi	Pagu Indikatif APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Secara umum, rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang tahun 2021 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2021. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, atau terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Rembang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Rembang untuk pembangunan balai desa	Tlogomojo - Rembang	Terbangunnya Balai Desa	100.000.000	
2	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang, untuk pembangunan gapura balai desa	Punjulharjo - Rembang	Terbangunnya Gapura Balai Desa	100.000.000	
3	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pulo Kecamatan Rembang untuk Pengaspalan Jalan Makam RT 05 RW 03 Dukuh Sugihan Desa Pulo Kecamatan Rembang	Pulo - Rembang	Terbangunnya Aspal Jalan	100.000.000	Desa Pulo termasuk kategori Desa Merah dengan besaran Bankeu maksimal Rp150.000.000,-.
4	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kabongan Lor Untuk Pembangunan Gapura Rt 01 Rw 01 Desa Kabongan Lor Kecamatan Rembang,	Kabongan Lor - Rembang	Terbangunnya Gapura Desa	75.000.000	
5	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Sumberjo Kec. Rembang untuk sarana dan prasarana RT 2 / RW 2 Desa Sumberjo	Sumberjo - Rembang	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Desa	75.000.000	
6	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kasreman Kec. Rembang untuk aspal sandsheet Desa Kasreman (RT. 7 / RW. 1)	Kasreman - Rembang	Terbangunnya Aspal Sandsheet	75.000.000	
7	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tasikagung Kec Rembang	Tasikagung - Rembang		70.000.000	Nama Kegiatan Tidak ada

8	Bantuan Keuangan Kepada Desa Pemerintah Gedangan Kec. Rembang Untuk Pembuatan Gapura	Gedangan - Rembang	Terbangunnya Gapura Desa	30.000.000	
9	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Waru Kec. Rembang Untuk Pengecoran Jalan Rt 05 Rw 01	Waru - Rembang	Terbangunnya Pengecoran Jalan	50.000.000	
10	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Padaran Kec. Rembang Untuk Pengecoran jalan	Padaran - Rembang	Terbangunnya Pengecoran Jalan	50.000.000	
11	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabongan Kidul Kec. Rembang Untuk Pembangunan Jalan Desa	Kabongan Kidul - Rembang	Terbangunnya Jalan Desa	125.000.000	
12	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngotet Kec. Rembang Untuk Pembangunan Drainase RW 04	Ngotet - Rembang	Terbangunnya Drainase	100.000.000	
13	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumberjo Kec. Rembang Untuk Penataan Sampah Lingkungan	Sumberjo - Rembang	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	50.000.000	
14	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Untuk Penataan Jalan Wisata Mangrove	Pasarbanggi - Rembang	Terbangunnya Penataan Jalan Wisata Mangrove	125.000.000	
15	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pulo Kec. Rembang untuk Pembangunan Gedung Serba Guna Dk. Sugihan Ds. Pulo	Pulo - Rembang	Terbangunnya Gedung Serba Guna	100.000.000	Desa Pulo termasuk kategori Desa Merah dengan besaran Bankeu maksimal Rp150.000.000,-. Rencana tahun 2021 Desa Pulo mendapatkan Bankab 2 titik masing senilai Rp100.000.000,-, sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp50.000.000,-.
16	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mondoteko Kec. Rembang untuk Penataan Lingkungan Ds. Mondoteko Kec. Rembang	Mondoteko - Rembang	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	150.000.000	Desa Mondoteko termasuk kategori Desa Kuning, dengan besaran Bankeu maksimal Rp125.000.000,-.
17	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Waru Kec. Rembang untuk Penataan Lingkungan Ds. Waru Kec. Rembang	Waru - Rembang	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	100.000.000	
18	Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa Kumendung untuk Penataan lingkungan Kantor desa (pagar)	Kumendung - Rembang	Terbangunnya Pagar Lingkungan Kantor Desa	75.000.000	

19	Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa Sridadi Kec. Rembang untuk pengaspalan Jalan Makam Sridadi (Badeg)	Sridadi - Rembang	Terbangunnya Aspal Jalan	100.000.000	
20	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pancur Kec. Pancur untuk pembangunan lapangan bola dan jogging track Desa Pancur Kec. Pancur	Pancur - Pancur	Terbangunnya Lapangan Bola dan Jogging Track	100.000.000	Sesuai menu Perbub.
21	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Warugunung Kec. Pancur untuk Pelatihan jaringan internet & fiber optik	Warugunung - Pancur	Terlaksananya Pelatihan Jaringan Internet dan Fiber Optik	50.000.000	
22	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Langkir Kec. Pancur untuk pembangunan jaringan irigasi	Langkir - Pancur	Terbangunnya jaringan irigasi	50.000.000	
23	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumberagung Kec. Pancur untuk pembangunan PAB Dk. Nyode Ds. Sumberagung	Sumberagung - Pancur	Terbangunnya PAB	100.000.000	
24	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gedongmulyo Kec. Lasem untuk pembangunan lapangan bola Desa Gedongmulyo Kec. Lasem	Gedongmulyo - Lasem	Terbangunnya Lapangan Bola	100.000.000	
25	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dasun Kec. Lasem Untuk Pembangunan Tebing Pemancingan Desa Dasun Kec. Lasem	Dasun - Lasem	Terbangunnya Tebing Pemancingan Desa	50.000.000	
26	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dasun Kec. Lasem Untuk Pembangunan Tebing Pemancingan Desa Dasun Kec. Lasem	Dasun - Lasem	Terbangunnya Tebing Pemancingan Desa	50.000.000	Ada judul kegiatan Bankeu sama untuk Desa Dasun nilainya sama, Desa Dasun klasifikasi Desa Biru dengan maksimal Bankeu Rp75.000.000,-
27	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Soditan Kec. Lasem untuk Pengembangan Kantor Pemerintahan Desa	Soditan - Lasem	Pengembangan Kantor Pemerintahan Desa	100.000.000	
28	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karaskepoh Kec. Pancur untuk pembangunan paving bahu jalan Dukuh Karaskepoh	Karasgede - Lasem	Terbangunnya Paving Bahu Jalan	150.000.000	Desa Karaskepoh berada di Kecamatan Pancur, termasuk dalam klasifikasi Desa Biru dengan besaran Bankeu paling banyak Rp75.000.000,-
29	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangturi Kec. Lasem untuk peningkatan jalan RT 2 RW 5	Karangturi - Lasem	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	100.000.000	
30	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumbergirang Kec. Lasem untuk penataan lingkungan	Sumbergirang - Lasem	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	100.000.000	

31	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dorokandang Kec. Lasem untuk Penataan Lingkungan RT 12	Dorokandang - Lasem	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	125.000.000	
32	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karasgede Kec. Lasem Penataan Lingkungan RT 9	Karasgede - Lasem	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	100.000.000	
33	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tasiksono Kec. Lasem untuk Pavingisasi	Tasiksono - Lasem	Terbangunnya Pavingisasi Jalan	30.000.000	
34	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangharjo Kec. Kragan untuk peningkatan kapasitas lembaga desa dan pentas seni	Karangharjo - Kragan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa & Pentas Seni	120.000.000	Judul/peruntukan kegiatan tidak sesuai menu Perbup No. 21 Tahun 2018 Pasal 6
35	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karanglincak Kec. Kragan untuk peningkatan kapasitas lembaga desa dan pentas seni	Karanglincak - Kragan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa & Pentas Seni	100.000.000	Judul/peruntukan kegiatan tidak sesuai menu Perbup No. 21 Tahun 2018 Pasal 6
36	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebloran Kec. Kragan untuk Pembangunan Gedung Serba Guna	Kebloran - Kragan	Terbangunnya Gedung Serba Guna	100.000.000	
37	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumbersari Kec. Kragan untuk Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Sumbersari - Kragan	Terbangunnya Lapangan Sepak Bola	75.000.000	
38	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Watupecah Kec. Kragan untuk Betonisasi Jalan Kampung Desa Watupecah RT 01/ RW 01 Kecamatan Kragan	Watupecah - Kragan	Terbangunnya Betonisasi Jalan	100.000.000	Desa Watupecah termasuk kategori Desa Biru, dengan besaran Bankeu maksimal Rp75.000.000,-
39	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanjungan Kec. Kragan untuk Drainase RT 03/ RW 01 Desa Tanjungan Kecamatan Kragan	Tanjungan - Kragan	Terbangunnya Drainase	100.000.000	
40	Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Narukan Kec. Kragan untuk pembangunan Gapuro Desa Narukan Kecamatan Kragan	Narukan - Kragan	Terbangunnya Gapura Desa	75.000.000	
41	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sendang Kec. Kragan untuk pembangunan Pagar Makam Desa Sendang Kecamatan Kragan	Sendang - Kragan	Terbangunnya Pagar Makam Desa	75.000.000	
42	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sendangmulyo Kec. Kragan untuk Pengecoran Jalan Makam Dukuh Bogoran Desa Sendangmulyo Kecamatan Kragan	Sendangmulyo - Kragan	Terbangunnya Pengecoran Jalan Desa	100.000.000	

43	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Woro Kec. Kragan untuk pembangunan drainase Desa Woro RT 02 /RW 02 Kecamatan Kragan	Woro - Kragan	Terbangunnya Drainase	100.000.000	Desa Woro termasuk kategori Desa Merah dengan maksimal Bankeu sebesar Rp150.000.000,-. Rencana tahun 2021 Desa Woro mendapatkan Bankab 2 titik masing-masing senilai Rp100.000.000,-, sehingga terdapat kelebihan nilai Bankab sebesar Rp50.000.000,-.
44	Pelatihan Batik Lasem bagi Ibu-Ibu PKK dari 27 Desa Se-Kecamatan Kragan	Kragan-Kragan	Terlaksananya Pelatihan Membatik	50.000.000	
45	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumurpule Kec. Kragan untuk pembangunan drainase dukuh klabang	Sumurpule - Kragan	Terbangunnya Drainase	125.000.000	
46	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Terjan Kec. Kragan untuk pengadaan pal listrik desa terjan	Terjan - Kragan	Terbangunnya Pal Listrik	50.000.000	
47	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pandangan Kulon Kec. Kragan untuk pengadaan pal listrik Desa Pandangan Kulon	Pandangan Kulon - Kragan	Terbangunnya Pal Listrik	50.000.000	
48	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Plawangan Kec. Kragan Untuk Pembangunan Gedung Pertemuan Nelayan	Plawangan - Kragan	Terbangunnya Gedung Pertemuan Nelayan	100.000.000	
49	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kragan Kec. Kragan untuk penataan lapangan olahraga	Kragan - Kragan	Terbangunnya lapangan olahraga	125.000.000	
50	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sendangwaru Kec. Kragan untuk pengecoran jalan makam	Sendangwaru - Kragan	Terbangunnya Jalan makam	100.000.000	
51	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Woro Kec. Kragan untuk Pembangunan Dam (Bendungan)	Woro - Kragan	Terbangunnya Dam (Bendungan)	100.000.000	
52	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngasinan Kec. Kragan untuk pembangunan Drainase	Ngasinan - Kragan	Terbangunnya Drainase	125.000.000	
53	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sudan Kec. Kragan untuk pengadaan sarana prasarana air bersih	Sudan - Kragan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih	100.000.000	
54	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pandangan Wetan Kec. Kragan untuk pembangunan rompok nelayan	Pandangan Wetan - Kragan	Terbangunnya rompok nelayan	50.000.000	

55	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Trahan Kec. Sluke untuk pengadaan sumur bor	Trahan - Sluke	Terbangunnya sumur bor	50.000.000	
56	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Manggar Kec. Sluke untuk pengadaan sumur bor dukuh geneng	Manggar - Sluke	Terbangunnya sumur bor	25.000.000	
57	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Labuhan Kidul Kec. Sluke untuk pengecoran jalan makam	Labuhan Kidul - Sluke	Terbangunnya jalan makam	150.000.000	
58	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah desa Sendangmulyo Kec. Sluke untuk penataan lingkungan	Sendangmulyo - Sluke	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	0	Belum ada nilai Bankeu nya.
59	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Sidorejo Kec. Sedan untuk pembangunan drainase Rt 01 Rw 2 Desa Sidorejo	Sidorejo - Sedan	Terbangunnya Drainase	100.000.000	
60	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Untuk Pembuatan Lapangan Bola Volly	Candimuyo - Sedan	Terbangunnya Lapangan Volly	75.000.000	
61	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karas Kecamatan Sedan Untuk Pembuatan Lapangan Bola Volly	Karas - Sedan	Terbangunnya Lapangan Volly	75.000.000	
62	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karas Kecamatan Sedan Untuk Pembuatan PAB Di Dukuh Balokan RT 02 RW 04	Karas - Sedan	Terbangunnya PAB	75.000.000	
63	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Sedan Untuk Pembuatan PAB Di Dukuh Gondosari	Sidomulyo - Sedan	Terbangunnya PAB	100.000.000	
64	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Menoro Kec. Sedan untuk penataan lingkungan	Menoro - Sedan	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	150.000.000	
65	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jambeyan Kec. Sedan untuk penataan lingkungan	Jambeyan - Sedan	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	100.000.000	
66	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangasem Kec. Sedan untuk penataan lingkungan	Karangasem - Sedan	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	100.000.000	
67	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kumbo Kec. Sedan untuk penataan lingkungan	Kumbo - Sedan	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	100.000.000	
68	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngulahan Untuk Pengaspalan Lorong RT 04 /RW 01 Dan RT 05 / RW 01 Desa Ngulahan	Ngulahan - Sedan	Terbangunnya Aspal Jalan Lorong	50.000.000	

69	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Lemahputih Kec. Sedan untuk penataan lingkungan	Lemahputih - Sedan	Terbangunnya Penataan Lingkungan Desa	100.000.000	
70	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngulahan Kec. Sedan Untuk Renovasi Kantor Desa Dan Pagar Desa Ngulahan, Kec Sedan	Ngulahan - Sedan	Terbangunnya Kantor Desa dan Pagar Desa	50.000.000	
71	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gilis kec. Sarang Kab. Rembang untuk Pembangunan Balai Desa	Gilis - Sarang	Terbangunnya Balai Desa	125.000.000	
72	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Karangmangu Kec. Sarang untuk Rehab Pagar Makam Sempol Jalur Pantura Desa Karangmangu Kec. Sarang	Karangmangu - Sarang	Terbangunnya Pagar Makam Desa	125.000.000	
73	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Banowan Kec. Sarang untuk pembangunan jalan	Banowan - Sarang	Terbangunnya Jalan Desa	125.000.000	
74	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Temperak Kec. Sarang untuk pembangunan jalan	Temperak - Sarang	Terbangunnya Jalan Desa	100.000.000	
75	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Bajingjowo Kec. Sarang untuk pengaspalan jalan	Bajingjowo - Sarang	Terbangunnya Jalan Aspal	125.000.000	
76	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Nglojo Kec. Sarang Untuk Pengaspalan Jalan Desa Nglojo, Kec. Sarang	Nglojo - Sarang	Terbangunnya Jalan Aspal	50.000.000	
77	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tengger Kec. Sale untuk pengadaan bak air bersih	Tengger - Sale	Terbangunnya Bak Air Bersih	50.000.000	
78	Hibah Kepada Bumdes MUGI LUMINTU Desa Jinanten Kec. Sale	Jinanten - Sale	Hibah Bumdes	100.000.000	tidak sesuai menu Perbub yaitu Bankeu digunakan untuk 1.percepatan pembangunan; 2. pemberdayaan masyarakat. Jika yang dimaksud untukpemberdayaan masyarakat - Peningkatan usaha ekonomi desa melalui BUMDes, maka Pemerintah Desa memberikan Penyertaan Modal.
79	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonokerto Kec. Sale untuk Pembangunan pagar makam Desa Wonokerto Kec. Sale	Wonokerto - Sale	Terbangunnya Pagar Makam Desa	150.000.000	

80	Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Wonokerto Kec. Sale untuk Pemindahan Tiang listrik, dan pembangunan paving jalan RT 03 RW 04	Wonokerto - Sale	Terbangunnya Jalan Paving	100.000.000	
81	Bantuan Keuangan Kepada Desa Japerejo Kec. Pamotan untuk peningkatan produktifitas pertanian	Japerejo - Pamotan	Tercapainya Produktifitas Pertanian	125.000.000	
82	Bantuan Keuangan Kepada pemerintah desa Pragen Kec. Pamotan untuk pagar balai desa	Pragen - Pamotan	Terbangunnya Pagar Balai Desa	50.000.000	
83	Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Pamotan Kec. Pamotan untuk Pembangunan Gapura RT 02 RW 10	Pamotan - Pamotan	Terbangunnya Gapura Desa	50.000.000	
84	Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Pamotan Kec. Pamotan untuk Pembangunan Gapura RT 01 RW 12	Pamotan - Pamotan	Terbangunnya Gapura Desa	50.000.000	
85	Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Pamotan Kec. Pamotan untuk Pengadaan Terop RT 02 RW 10	Pamotan - Pamotan	Terbangunnya Terop	30.000.000	
86	Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Sendangagung Kec. Kaliori untuk Pembangunan Gapura	Sendangagung - Pamotan	Terbangunnya Gapura Desa	100.000.000	
87	Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Sumberejo Kec. Pamotan untuk Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sumberejo - Pamotan	Terbangunnya Lampu Penerangan jalan	65.000.000	
88	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pinggan Kec. Bulu untuk Penataan Lingkungan Makam	Pinggan - Bulu	Terbangunnya Penataan Lingkungan Makam	100.000.000	
89	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Sendangmulyo Kec. Bulu untuk Peningkatan Jalan Ds. Sendangmulyo RT 01 RW 03 Kec. Bulu	Sendangmulyo - Bulu	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	100.000.000	
90	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Warugunung Kec. Bulu untuk Pengadaan Air Bersih	Warugunung - Bulu	Terbangunnya Air Bersih	75.000.000	tidak sesuai menu Perbub yaitu untuk Pembangunan sarana dan prasarana air bersih, bukan untuk pengadaan air bersih.
91	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Lambangan Wetan Kec. Bulu untuk Pengadaan Air Bersih Ds. Lambangan Wetan Kec. Bulu	Lambanngan Wetan - Bulu	Terbangunnya Air Bersih	75.000.000	tidak sesuai menu Perbub yaitu untuk Pembangunan sarana dan prasarana air bersih, bukan untuk pengadaan air bersih.

92	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Lambangan Kulon Kec. Bulu untuk Peningkatan jalan desa	Lambangan Kulon - Bulu	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	100.000.000	Desa Lambangan Kulon termasuk kategori Desa Biru dengan besaran Bankeu Maksin
93	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pondokrejo Kec. Bulu Peningkatan jalan desa	Pondokrejo - Bulu	Terbangunnya Sarana Prasarana Desa	100.000.000	
94	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cabean kec. Bulu untuk perbaikan jalan Cabean - sumbermulyo	Cabean - Bulu	Terbangunnya Jalan Desa	100.000.000	Desa Cabean termasuk kategori Desa Biru dengan besaran Bankeu maksimal Rp75.000.000,-, dan terkait status aset jalan poros Cabean-Sumbermulyo apabila milik Pemkab maka harus mendapatkan Izin.
95	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu untuk pembangunan gedung BUMDES	Kadiwono - Bulu	Terbangunnya gedung BUMDES	100.000.000	Desa Kadiwono masuk kategori Desa Biru dengan besaran Bankeu maksimal Rp75.000.000,-
96	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pasedan, Kecamatan Bulu untuk pembangunan Gapura	Pasedan - Bulu	Terbangunnya Gapura Desa	100.000.000	
97	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Landoh Kec. Sulang untuk Peningkatan jalan Makam	Landoh - Sulang	Terbangunnya jalan Makam	100.000.000	
98	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Landoh Kec. Sulang untuk Pengadaan sarana dan prasarana (Tratak & Kursi)	Landoh - Sulang	Pengadaan Tratak dan Kursi	50.000.000	Tratak dan kursi dicatat menjadi barang milik/aset desa. Selanjutnya memakai mekanisme hibah barang apabila bermaksud diserahkan kepada Kelompok Masyarakat
99	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kaliombo Kec. Sulang untuk Pembangunan Jalan Aspal	Kaliombo - Sulang	Terbangunnya Jalan Aspal	125.000.000	terima
100	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kemadu Kec. Sulang untuk rabat beton RW 04	Kemadu - Sulang	Terbangunnya Rabat Beton	125.000.000	
101	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tegaldowo Kec. Gunem untuk pembangunan jalan	Tegaldowo - Gunem	Terbangunnya Jalan Desa	75.000.000	

102	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Demaan Kec. Gunem Untuk Pembangunan Gapura Dukuh Becici	Demaan - Gunem	Terbangunnya Gapura Desa	50.000.000	
103	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Panohan Kec. Gunem Untuk Pembangunan Gapura	Panohan - Gunem	Terbangunnya Gapura Desa	25.000.000	
104	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Logung Kec.Sumber untuk Pembangunan gapura	Logung - Sumber	Terbangunnya Gapura Desa	75.000.000	
105	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tlogotunggal Kec. Sumber untuk penataan lapangan sepak bola dan lapangan voli	Tlogotunggal - Sumber	Terbangunnya Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Volly	125.000.000	satu Proposal ada dua RAB.
106	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kuangsan Kec. Kaliori untuk Pembangunan Drainase Jalan Desa Kuangsan RT 05 RW 01 Kec. Kaliori	Kuangsan - Kaliori	Terbangunnya Drainase	125.000.000	
107	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Babadan Kec. Kaliori untuk Pembangunan Jalan dan Drainase Gang Gendol Joyo Blok Musholla Baiturohman RT 01 RW 03 Desa babadan Kec. Kaliori	Babadan - Kaliori	Terbangunnya Jalan dan Drainase	150.000.000	
108	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pengkol Kec. Kaliori untuk pembuatan tratak yang dikelola karang taruna setia bakti	Pengkol - Kaliori	Pembuatan Tratak	75.000.000	Tratak dicatat menjadi barang milik/aset desa. Selanjutnya memakai mekanisme hibah barang apabila bermaksud diserahkan kepada Kelompok Masyarakat.
109	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dresi Kulon Kec.Kaliori untuk pembangunan sarana Prasarana Olah Raga	Dresi Kulon - Kaliori	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olah Raga	50.000.000	
110	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dresi Wetan Kec. Kaliori untuk pembangunan Gapura	Dresi Wetan - Kaliori	Terbangunnya pembangunan Gapura	100.000.000	Desa Dresi wetan termasuk kategori Desa Biru, dengan besaran Bankeu maksimal Rp75.000.000,-
111	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Karangsekar Kec. Kaliori untuk Pembangunan jalan lingkungan RT.04 RW 03	Karangsekar - Kaliori	Terbangunnya Jalan Desa	50.000.000	
112	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Kaliori untuk pembangunan jalan dan sarana prasarana desa	Sidomulyo - Kaliori	Terbangunnya Jalan Desa dan Sarana Prasarana Desa	50.000.000	

113	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Meteseh Kec. Kaliori untuk Pembangunan Drainase	Meteseh - Kaliori	Terbangunnya Drainase	85.000.000	
114	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wiroto Kec. Kaliori untuk Pembangunan Pagar Makam Mbah Joyo Dukuh Semambung Desa Wiroto Kec. Kaliori	Wiroto - Kaliori	Terbangunnya Pagar Makam	80.000.000	
115	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Kaliori untuk Pembangunan Tempat Parkir Makam Desa Sidomulyo Kec. Kaliori	Sidomulyo - Kaliori	Terbangunnya Tempat Parkir Makam	30.000.000	
116	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Kaliori untuk pembangunan tempat keranda makam dukuh Kalipang	Sidomulyo - Kaliori	Terbangunnya Tempat Keranda Makam	20.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINPERMADES

KABUPATEN REMBANG

3.1.Telaahan Renstra Kemendes (2015-2019) dan Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah (2018-2023)

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

a. Tujuan

Tujuan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah; dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

b. **Sasaran**

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015 - 2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.
3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu :
   1) Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;

2) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
3) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
4) Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Telaah Renstra Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

NO	Sasaran Jangka Renstra Kementrian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	Sasaran Pembangunan Desa dan KAwasan Perdesaan Sasaran pembangunan dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sekitinya 2.000	1. Fasilitasi kepada (Kabupaten/kota) untuk mendorong pemenuhan *Basic Life Acces* dalam rangka meningkatan Kesejahteraan Masyarakat; 2. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi desa;	1. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa; 2. Belum semua Kabupaten menyusun regulasi tentang pengembangan kawasan pedesaan	**Faktor Penghambat** 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Terbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Belum seluruh Kabupaten menetapkan Kawasan perdesaan; 4. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab/kota dalam pelaksanaan pembangunan **Faktor Pendorong** 1. Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa 2. Dukungan pendampingan anggaran; 3. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; 4. Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di

				desa;

3.2.Telaahan Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

a. Tujuan :

1. Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatn sipil di Jawa Tengah.

b. Sasaran :

1. Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah
2. Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinpermadesdukcapil tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.2
Telaah Renstra Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4
Sasaran Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	**1.** Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **2.** Fasilitasi kepada kabupaten/kota untuk mendorong pemenuhan Basic life Acces dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat **3.** Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi Des **4.** Penguatan kelembagaan, perluasan usaha akses memberikan bantuan penguatan modal BUMDesa/Bumdes bersama **5.** Pengembangan Partisipasi masyarakat melalui Lembaga Budaya Sosial Ekonomi Desa **6.** Fasilitasi Pemberian bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan	**1.** Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa **2.** Belum dikembangkan kawasan pedesaan **3.** Potensi penyelewengan dan penyalahgunaan alokasi Bantuan Keuangan Desa **4.** Regulasi dan mekanisme pemberian bantuan keuangan perlu disempurnakan **5.** Masih terdapat usulan belum sesuai kondidi kebutuhan desa dan masyarakat **6.** Belum seluruh Desa di Jawa Tengah memiliki BUMDes **7.** Masih terdapat kelembagaan BUMDes yang mengembangkan usaha belum	**Faktor Penghambat** 1. Belum seluruh Desa memahami mekanisme penerimaan Bantuan Keuangan Desa 2. Fasilitasi dan Koordinasi Tim Pengelola Bantuan Keuangan Desa belum optimal 3. Kewenangan Provinsi terbatas 4. SDM pengelola BUMDes arata-rata disi dari perangkat desa yang notabne tidak diperbolehkan 5. Penguatan kelembagaan belum sesuai kebutuhan BUMDes **Faktor Pendorong** 1. Dukungan dana komitmen eksekutif dan legeslatif 2. Masih terdapat pembangunan desa di Jawa Tengah yang belum merata 3. Tingkat kemiskinan di pedesaan masih relative tinggi 4. Adanya Regulasi pembinaan dan pengawasan BUMDes

	7. Fasilitasi prnguatan kelembagaan dan pengembangan usaha serta bantuan penguatan modal bagi BUMDesa/BUMDes bersama	berbasis potensdi des 8. SDM pengelola BUMDes rata-rata belum memahami manajemen 9. Belum Adnya penetapan klasifikasi BUMDes sebagai dasar pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan BUMDes	5. Adanya dukungan Dana Desa, Bantuan Keuangan, Hibah maupun bansos untuk penyertaan modal maupun pengmbangan usaha 6. Adanya Potensi embrio lembaga Desa yang dapat dijadikan unit usaha BUMDes

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Dinpermades Kabupaten Rembang

3.3.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh DINPERMADES Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Masyarkat Desa.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan good governance. Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam hal ini Dinpermades Kabupaten Rembang diharapkan menjadi koordinator yang mampu mewujudkan keberdayaan masyarakat dengan didukung Pemerintahan Desa yang akuntabel, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

3.3.2 Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinpermades Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinpermades dalam rangka pencapaian tujuan Dinpermades selama tahun 2016-2021, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinpermades
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinpermdes
3. Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang sebagaimana tersaji dalam tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Jangka Menengah
Pelayanan DINPERMADES Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	REALISASI CAPAIAN				TARGET CAPAIAN	
					TH. 2016	TH. 2017	TH. 2018	TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Misi I : "Mewujudkan Pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip Pemerintahan yang Amanah"										
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinpermades		Nilai SAKIP Dinpermades	Nilai	52	55,04	58,64	55-60	60-70	70-80
			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinpermades	Nilai	73,12	76,86	77,81	78,5	78,5-82,25	82,26-88
		1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinpermades	Nilai SAKIP Dinpermades	Nilai	52	55,04	58,64	55-60	60-70	70-80
		2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinpermades	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dinpermades	Nilai	73,12	76,86	77,81	78,5	78,5-82,25	82,26-88,30
2	Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Masyarkat Desa		% desa dengan Kinerja Baik	%	na	na			70	75
		3 Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat	% Level Kemandirian Desa	%	na	na			70	75

3.4 Perbandingan Rentra Lama dan Baru

No	RENSTRA LAMA		RENSTRA BARU	
	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah tangga 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/kebersihan 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Desa	1. Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 4. Peningkatan dan pengembangan system pelaporan keuangan
			Program perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Desa	5. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 6. Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
			Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	7. Pengelolaan keterbukaan informasi publik
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17. Pembinaan Internal Pegawai		
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18. Fasilitasi program Olahraga		
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Desa		
		20. Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 21. Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah 22. PenyusunanRestra, Renja		
6.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi esa	23. Exit Strategi PNPM Mandiri Perdesaan (Stategi Pasca PNPM Mandiri Perdesaan) 24. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)		

No	RENSTRA LAMA		RENSTRA BARU	
	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
7.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	25. Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG) 26. Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) 27. Pendampingan Rintisan Model Desa Berdikari/Mandiri 28. Bazar TMMD	Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis masyarakat 9. Pengembangan kerja sama, sumber daya alam dan teknologi tepat guna (TTG)
8.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	29. Capacity Building (Pengembangan Kemampuan/Pengelola Pembangunan Perdesaan) 30. Penguatan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 31. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 32. Penguatan Pokjanal Posyandu	Program Penyelenggaraan Pemberdayaan pemerintah Desa	10. Fasilitasi pengelolaan manajemen keuangan dan aset desa 11. Peningkatan kapasitas pemerintah desa
9.	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	33. Operasional Pendamping Program Pemberdayaan dan pembangunan Masyarakat dan Desa 34. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35. Penguatan Badan Perwakilan Desa (BPD) 36. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perdesaan 37. KIE Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 38. Penguatan dan Pengembangan lembaga Sosial Budaya Perdesaan 39. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) lternatif 40. Penguatan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) 41. Fasilitasi Pengembangan Posyantek Kecamatan 42. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahaan 43. Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahretaan Keluarga (PKK) 44. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 45. Gelar Hari Kesatuan Gerakan Pemberdayaan Keluarga 46. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan 47. Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) 48. Penguatan Kelembagaan Asosiasi Pengelola SPAMS Kabupaten 49. Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarkat	Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	12. Penguatan lembaga ekonomi desa berbasis pemberdayaan masyarakat 13. Penguatan lembaga sosial budaya

No	RENSTRA LAMA		RENSTRA BARU	
	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
		(BKPBM)		
10	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	48. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif desa 49. Pengembangan Sisten Informasi Desa 50. Pembinaan Aparatur Desa		
11.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum	51. Pendampingan Pelaksanaan TMMD 52. Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Kabupaten 53. Pendampingan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa ke Provinsi 54. Penyelenggaraan Tentara manunggal Membangun Desa (TMMD)		
12.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintah Desa	55. Pembangunan SISKEUDES 56. Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa 57. Penataan Aset Desa 58. Pendampingan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa Bagi Hasil dan Retribusi Daerah 59. Fasilitasi Pengawalan, Pengawasan Dana Desa 60. Pendampingan Penyusunan Profil Desa		
13	Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan	61. Pemberdayaan Perempuan Perdesaan		
14	Program Penanggulangan Kemiskinan	62. Pelatihan Usaha Mandiri		

3.4. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Tahun 2021 adalah tahun kelima Renstra Dinpermades Kabupaten Rembang periode 2016-2021. Renja Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2021 disusun berdasarkan analisa kebutuhan dan arahan kebijakan RKPD Tahun 2021. Secara rinci, rumusan Program dan Kegiatan Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Programdan Kegiatan JangkaMenengah
Pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang
Tahun 2021

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian
1	2	3	4
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kota**	% ketercapaian pelayanan umum, % Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur, % pemenuhan pelayanan kepegawaian, % pemenuhan pelayanan keuangan, % Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah, % Informasi yang disampaikan kepublik	95% 95% 95% 95% 70% 95%
1.	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik	3 dok, 2 dok, 2 informasi
a	Penyusunan dokumen perencanaan peranngkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dok
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 dok
c	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik	2 dok, 2 informasi
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik	3 dok
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik	1 dok
b	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik	2 dok
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik	4 dok

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian
1	2	3	4
a	Peningkatan sarana dan disiplin pegawai	Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik dalam pelayanan kepegawaian	4 dok
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja	100%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan sarana kerja aparatur	100%
c	Penyediaan peralatan rumah tangga	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor	100%
d	Peyediaan bahan logistik kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor	100%
e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
g	Penyediaan bahan/material	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
h	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan Perjalanan Dinas aparatur	100%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik	2 dok
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik	1 dok

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian
1	2	3	4
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik	1 dok
II	**Program Penataan Desa**	**Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik**	100%
1.	Penyelenggaraan penataan desa	Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	258 desa
a	Fasilitasi penataan kewenangan desa	Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	30 desa
b	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		
III	**Program Peningkatan Kerja Sama Desa**	**Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%, Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama**	16% 85%
1.	Fasilitasi Kerjasama antar desa	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	2 kawasan
a.	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah MOU/ perjanjian kerjasama yang difasilitasi	4 MOU
b	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten / kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa/kecamatan /kabupaten	4 desa
3.	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	2 kawasan
IV	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)**	80%
		Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	100%
		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	95%
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis)	Rp. 19.229.000.000.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian
1	2	3	4
a.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi antara Dinas, Kecamatan, TPP dan instansi lintas sektoral	20 kegiatan
b	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah peserta pelatihan penyusunan produk hukum desa	80 orang
c	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta pelatihan perencanaan pembangunan partifisipatif	80 orang
d	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta pelatihan dan monitoring pengelolaan keuangan desa	287 orang
e	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa	Jumlah peserta yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek	60 orang
f	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah anggaran evaluasi dan pengawasan peraturan desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis)	574 peraturan daerah
g	Penyelenggaraan pemilihan, pengangakatan, pemberhentian kepala desa	Jumlah pelaksanaan pilkades antar waktu	10 kegiatan
h	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengisian perangkat desa	60 kegiatan
i	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Terlaksananya kegiatan evaluasi perkembangan desa	1 kegiatan
V.	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase Lembaga Desa aktif**	**90%**
1.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah /Kabupaten/ Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa aktif , Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumahan, Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif,Jumlah TTG yang dimanfaatkan	138, 24, 5650 lembaga, 1 buah
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif	5358 lembaga
b.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam	Jumlah lembaga ekonomi desa aktif, jumlah bumdesa yang bermitra denga industri rumahan	138, 24 lembaga

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian
1	2	3	4
	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
c	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang dimanfaatkan Industri Rumahan Keluarga Miskin	1 buah
d	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif dalam mendukung bulan bhakti gotong royong masyarakat	5 lembaga
e	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif	287 lembaga

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk dapat menjawab dinamika perkembangan pasca perubahan nomenklatur yang dimungkinkan terdapat beberapa kebijakan terkait teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdaayaan Masyarakat Kabupaten Rembang, maka disusun prioritas program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2021. Rencana Kerja DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun 2021 terdiri dari 6 Program dan 13 Kegiatan82pekerjaan dengan total pendanaan sebesar Rp. 9.570.580.200 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

Rincian rencana kerja dan pendanaan DINPERMADES Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan DINPERMADES Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**0**	**0**			
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				**159.984.794.000**	**0**	**0**			**192.456.860.000**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*% ketercapaian pelayanan umum*	**Dinpermades Kab. Rembang**	95%	**4.735.723.000**	**0**	**0**		95%	**5.318.513.000**
		% Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur		95%					95%	
		% pemenuhan pelayanan kepegawaian		95%					95%	
		% pemenuhan pelayanan keuangan		95%					95%	
		% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah		70%					70%	
		% Informasi yang disampaikan kepublik		95%					95%	
	Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik*		*3 dok, 2 dok, 2 informasi*	***56.100.000***				*3 dok, 2 dok, 2 informasi*	110.550.000

	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun*		*2 dok*	*16.000.000*				*2 dok*	25.000.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	*Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun*		*1 dok*	*4.700.000*				*1 dok*	15.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang Disampaikan Kepublik*		*2 dok, 2 informasi*	*35.400.000*				*2 dok, 2 informasi*	70.550.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik*		*3 dok*	***3.549.883.000***				*3 dok*	4.005.223.000
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	*Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik*		*1 dok*	*3.324.283.000*				*1 dok*	3.805.223.000
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan Kualitas baik*		*2 dok*	*225.600.000*				*2 dok*	200.000.000
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00%	**619.640.000**	**0**	**0**		100,00%	**796.140.000**
	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran*		*100%*	*3.000.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (DAU)	*100%*	1.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	Dinpermades Kab. Rembang	*100%*	*54.596.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (DAU)	*100%*	57.600.000

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	Dinpermades Kab. Rembang	*100%*	*10.000.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (DAU)	*100%*	15.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran*	Dinpermades Kab. Rembang	*100%*	*552.044.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*100%*	722.040.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran*		*100%*	***235.100.000***				*100%*	270.000.000
	Penyediaan Bahan Material	*% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran*	Dinpermades Kab. Rembang	*100%*	*20.000.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*100%*	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran*	Dinpermades Kab. Rembang	*100%*	*10.000.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*100%*	10.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja*	Dinpermades Kab. Rembang	*100%*	*7.500.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*100%*	10.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	*% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan sarana kerja aparatur*	Dinpermades Kab. Rembang	*100%*	*14.000.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*100%*	10.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	*% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor*	Dinpermades Kab. Rembang	*100%*	*10.000.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*100%*	10.000.000

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	*% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran*	Dinpermades Kab. Rembang	*100%*	*3.600.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*100%*	3.600.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	*% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor*	Dinpermades Kab. Rembang	*100%*	*30.000.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*100%*	56.400.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan Perjalanan Dinas aparatur*		*100%*	*140.000.000*				*100%*	150.000.000
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik*		*2 dok*	***265.000.000***				*2 dok*	112.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik*		*1 dok*	*40.000.000*				*1 dok*	57.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik daerah yang Dikelola dengan baik*		*1 dok*	*225.000.000*				*1 dok*	55.000.000

	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	*Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik*		*4 dok*	***10.000.000***				*4 dok*	24.600.000
	Peningkatan sarana dan disiplin pegawai	*Jumlah Dokumen Menejemen yang di kelola dengan baik dalam pelayanan kepegawaian*	Dinpermades Kab.Rembang	*4 dok*	*10.000.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*4 dok*	24.600.000
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	**Kabupaten Rembang**	16%	**1.577.700.000**	**0**	**0**		16%	**2.495.000.000**
		Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama		85%					85%	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	Kabupaten Rembang	2 kawasan	**1.577.700.000**	**0**	**0**		2 kawasan	**2.495.000.000**
	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah MOU/ perjanjian kerjasama yang difasilitasi		4 MOU	105.000.000				4 MOU	**270.000.000**
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang		*2 kawasan*	*577.700.000*				*2 kawasan*	1.020.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa/kecamatan /kabupaten		*4 desa*	*895.000.000*				*4 desa*	1.205.000.000

	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	**Dinpermades Kab. Rembang**	80,00%	**124.798.971.000**	**0**	**0**		80,00%	**136.898.347.000**
		Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik		100.00 %					100.00 %	
		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel		95%					95%	
	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis)	Dinpermades Kab. Rembang	19.229.000.000.000	**124.798.971.000**	**0**	**0**		19.229.000.000.000	**136.898.347.000**
	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi antara Dinas, Kecamatan, TPP dan instansi lintas sektoral		20 kegiatan	40.000.000				20 kegiatan	130.000.000.000
	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah peserta pelatihan penyusunan produk hukum desa		80 orang	*20.000.000*				80 orang	*75.000.000*
	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah peserta pelatihan perencanaan pembangunan partifisipatif		80 orang	*30.000.000*				80 orang	*75.000.000*
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta pelatihan dan monitoring pengelolaan keuangan desa		287 orang	*123.968.971.000*				287 orang	500.000.000
	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah peserta yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek		60 orang	*25.000.000*				60 orang	1.018.500.000

	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah anggaran evaluasi dan pengawasan peraturan desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (pronangkis)		*574 peraturan daerah*	*525.000.000*				*574 peraturan daerah*	50.000.000
	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	*Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengisian perangkat desa*		*60 kegiatan*	*50.000.000*				*60 kegiatan*	100.000.000
	Penyelenggaraan pemilihan, pengangakatan, pemberhentian kepala desa	*Jumlah pelaksanaan pilkades antar waktu*		*10 kegiatan*	*50.000.000*				*10 kegiatan*	4.979.847.000
	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	*Terlaksananya kegiatan evaluasi perkembangan desa*		*1 kegiatan*	*90.000.000*				*1 kegiatan*	100.000.000
	Program Penataan Desa	*Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik*		*100%*	***27.810.000.000***				*100%*	**45.755.000.000**
	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart*		*258 desa*	*27.810.000.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*258 desa*	45.755.000.000

	Fasilitasi penataan kewenangan desa	*Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart*		*30 desa*	*50.000.000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*30 desa*	50.000.000
	Fasilitasi sarana dan prasarana desa				*27.760.000.000*					45.705.000.000
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Desa aktif	**Kabupaten Rembang**	90%	**1.062.400.000**	**0**	**0**		90%	**1.990.000.000**
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah /Kabupaten/ Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/ Kota	,Jumlah Lembaga Ekonomi Desa aktif , Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumahan, Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif,Jumlah TTG yang dimanfaatkan Industri Rumahan Keluarga Miskin		138, 24, 5650 lembaga, 1 buah	**1.062.400.000**	**0**	**0**		138, 24, 5650 lembaga	**1.990.000.000**
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif*		*287 lembaga*	*650.000.000*				*287 lembaga*	975.000.000

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif*		*5358 lembaga*	*133.000.000*				*5358 lembaga*	580.000.000
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	*Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif dalam mendukung bulan bhakti gotong royong masyarakat*		*5 lembaga*	50.000.000				*5 lembaga*	70.000.000
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah	*Jumlah lembaga ekonomi desa aktif, jumlah bumdesa yang bermitra denga industri rumahan*		*138, 24 lembaga*	105.000.000				*138, 24 lembaga*	240.000.000
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang dimanfaatkan Industri Rumahan Keluarga Miskin		1 buah	124.400.000	0	0		1 buah	125.000.000
TOTAL PAGU INDIKATIF					**159.984.794.000**	**0**	**0**			**192.456.860.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Awal (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021. Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021, maka dalam penyusunan RKPD, KUA dan PPAS akan dilakukan dengan dasar pada isi Renja DINPERMADES Tahun 2021 ini. Kebutuhan dana/pagu indikatif dimaksud dalam rancangan awal Renja ini masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah serta penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Rembang dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021. Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Rembang,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Rembang

H. SULISTIYONO, AP, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730528 199311 1 002